

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya dan jasa serta resiko kedepan. □ Perkembangan harga kebutuhan pokok dan kebutuhan barang strategis lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan selama triwulan IV bulan Oktober – Desember 2022 dengan rincian harga sebagai berikut : Gula pasir Rp.14.500,- s/d Rp.15.000,-, Minyak curah Rp. Rp.11.750, Minyak kemasan premium Rp.20.000./lt mengalami penurunan Rp.500/Lt Cabe merah keriting Rp.44.000- mengalami Kenaikan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp.7.500./Kg Cabai rawit Merah Rp.44.000./Kg mengalami kenaikan sebesar Rp.14.000/Kg Bawang merah Rp.26.500/Kg, mengalami penurunan sebesar 2.500/kg Bawang putih honan Rp.24.000,- Telur ayam broiler Rp.28.500-, Telur ayam Kampung Rp.35.000,-masih konstan, beras cap Soka Rp. 16.000.-/kg mengalami kenaikan Rp.500./Kg Beras cap IR 42 Rp. 13.000/Kg □ Harga Bahan Pokok pada Triwulan IV mengalami fluktuasi. a Komoditas Cabai merah keriting pada awal bulan Oktober Rp. 37.400.-/Kg naik menjadi 44.000/Kg di akhir Desember. b Harga Cabai rawit merah Naik dari semula Rp. 40.000 pada awal bulan Oktober 30.000 menjadi Rp. 45.000 di akhir Desember atau Naik sebesar Rp.15.000/Kg c Cabai rawit hijau mengalami penurunan harga dari awal Juli Rp. 30.000 menjadi Rp. 44.000 di akhir bulan Desember. d Minyak kemasan premium juga mengalami penurunan harga, pada awal bulan Oktober Rp.20.500 menjadi Rp.20.000 di bulan Desember. e Komoditas Beras Cap soka mengalami kenaikan harga dari Rp. 11.500 di awal bulan Oktober menjadi Rp. 17.000/Kg di bulan Desember. □ Kabupaten Pesisir Selatan adalah daerah Non IHK yang tidak melakukan penghitungan tingkat inflasi daerah, untuk perkembangan inflasi daerah mengacu kepada Kota Padang dengan memperhatikan harga pasar

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

2. Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Daerah □ Kenaikan harga barang kebutuhan pokok pada awal triwulan IV (bulan Oktober) yaitu Kenaikan harga Cabai merah keriting, Cabai rawit merah, dan cabe rawit hijau yang disebabkan oleh kurangnya pasokan □ Kenaikan harga barang kebutuhan pokok pada triwulan IV beras Cisoka,- s/d Rp.17.000-./Kg. disebabkan oleh tingginya permintaan akan beras premium ini baik untuk Sumbar maupun diluar Sumbar, kenaikan biaya produksi seperti biaya penggilingan dan upah angkut transportasi sebagai akibat dari kenaikan BBM, perubahan iklim dan cuaca yang mempengaruhi musim panen di daerah lain □ Pada akhir triwulan IV harga komoditas cabai keriting merah, cabai rawit merah dan cabai rawit hijau dan komoditi lainnya mengalami kenaikan karena terjadi peningkatan harga gabah tingkat petani dari 5200/kg menjadi 6800/Kg.serta naiknya biaya operasional untuk pengolahan gabah menjadi beras.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

3. Melaksanakan rapat koordinasi antara pemasok dan shochoolder terkait. Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di daerah Kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Tanah Datar yang telah dilaksanakan selama triwulan IV berdasarkan aspek 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi yang efektif) adalah

sebagai berikut : b. Keterjangkauan Harga • Pemantauan stok dan harga pangan tingkat Grosir • Pemantauan stok dan ketersediaan pangan tingkat produsen • Melakukan pemantauan harga dan stok pangan tingkat eceran • Pengawasan stok persediaan • Pelaksanaan Sidak ke Pasar dan distributor. • Ketersediaan Pasokan • Melakukan percepatan Tanam dimasing-masing Kecamatan. • Memberikan bantuan benih dan saprodi kepada petani • Pemantauan dan pengawalan pertanaman dilapangan dalam rangka pengamanan produksi dari serangan organisme pengganggu Tanaman • Realisasi program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) • Pemberian bantuan bibit Bawang Merah dan sarana/ prasarana kepada kelompok tani c. Kelancaran Distribusi • Satgas Pangan sudah melakukan pengawalan untuk kegiatan pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersama Dinas Sosial Pr,Pa • Adanya peningkatan koordinasi kerjasama terkait penyuluhan dan pembinaan Gapoktan pengelola lumbung Pangan, LDPM, PUPM, sehingga kegiatan usaha pangan dapat berjalan dengan baik dan optimal. d. Komunikasi yang Efektif • Melaksanakan High Level Meeting dan Rapat Koordinasi TPID setiap senin setelah zoom pengendalian inflasi bersama Mendagri. (18 Juli 2022) • Pencanangan Gerakan menanam Cabai • Mengikuti acara Rapat Pengawasan Pengendalian inflasi dengan Kemendagri yang dihadiri oleh beberapa menteri yang menyampaikan materi pengendalian inflasi untuk dilaksanakan di bawah jajaran kementerian oleh seluruh propinsi termasuk Polri dan TNI, Inspektorat melalui zoom meeting (23 agust 22) • Mengikuti Rapat Koordinasi HLM TPID se Sumbar di Ruang Pertemuan Bank Indonesia Prov.Sumbar dengan agenda Pembahasan perkembangan dan tekanan inflasi terkini serta upaya pengendalian inflasi ditengah tingginya resiko inflasi Sumbar. • Rapat koordinasi teknis pengendalian inflasi dengan OPD terkait.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

4. Evaluasi Kebijakan Pengendalian inflasi di Daerah □ Pelaksanaan operasi pasar mampu menstabilkan harga di pasar □ Optimalisasi alokasi BTT,DTU dan Dana desa untuk pengendalian inflasi daerah melalui pengajuan perubahan anggaran dengan bentuk alokasi berupa penyaluran bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap I dan II dalam rangka penanganan dampak inflasi sebanyak 2255 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) untuk Tahap I dan tahap II sebanyak 4.054 KPM

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

5. Rekomendasi Kebijakan pengendalian inflasi di daerah a. Pemantauan stok dan harga pangan Tingkat Produsen b. Pemantauan stok dan harga pangan Tingkat Grosir c. Pemantauan stok dan harga pangan Tingkat eceran d. Program Pengendalian inflasi sesuai dengan roadmap Penyusunan Peta Inflasi Tahun 2022-2024. e. Pelaksanaan Sidak ke Pasar f. Melaksanakan kegiatan – kegiatan teknis dengan perangkat daerah terkait yang menunjang pengendalian inflasi daerah sesuai dengan strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif) g. Melaksanakan koordinasi dengan Kab/Kota untuk saling tukar informasi dalam pengendalian inflasi. h. Pelaksanaan rapat teknis terkait pengendalian inflasi. i. Melaksanakan operasi pasar dalam rangka mengantisipasi harga terhadap kenaikan BBM. j. Memberikan bantuan gabah untuk Gapoktan dalam upaya peningkatan ketersediaan cadangan pangan masyarakat di Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) sebanyak 8 Ton per kelompok untuk 7 Gapoktan.